



Partisipasi Buruh Dalam Aksi Unjuk Rasa

Ratri Virianita

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Kelompok buruh dipilih mengingat sejak krisis moneter 1997 sejumlah peristiwa sosial berbentuk tingkah laku kelompok, seperti aksi unjuk rasa buruh, meningkat frekuensinya di berbagai perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan Smelser yang berperspektif sosiologis, teori Identitas Sosial menjelaskan tingkah laku kelompok dalam perspektif sosial-psikologis. Teori ini menekankan peranan identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok dalam proses terbentuknya tingkah laku kelompok. Dari subyek 102 buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, data memperlihatkan identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok merupakan prediktor yang signifikan terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa. Dengan metode stepwise diketahui bahwa keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif.

Katakunci: identifikasi kolektif, permeabilitas kelompok, aksi unjuk rasa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak krisis moneter 1997 yang mengawali runtuhnya rezim orde baru, frekuensi sejumlah peristiwa sosial berbentuk tingkah laku kelompok, seperti aksi unjuk rasa buruh, semakin meningkat. Data Depnaker (2001) menyebutkan bahwa sejak 1995-2000 telah terjadi 1.419 kasus aksi unjuk rasa atau pemogokan buruh. Jumlah aksi unjuk rasa terbesar di tahun 1996, yaitu sebanyak 350 kasus. Diduga hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang mulai melanda negara Indonesia.

Aksi unjuk rasa buruh bukanlah hal yang baru dalam sejarah gerakan perburuhan di Indonesia. Jauh sebelumnya, pada tahun 1882 sekitar 10 ribu buruh tani dari 30 pabrik gula dan perkebunan di Yogyakarta melakukan aksi mogok dan protes berdarah dalam tiga gelombang selama hampir tiga bulan (Geertz dalam Sudjana, 2002). Pemicunya, selain faktor upah yang rendah dan beratnya beban kerja, juga karena faktor eksploitasi feodalis dan kapitalis lain.

Hingga kini, aksi protes buruh masih mempersoalkan hal serupa, yaitu tingkat upah buruh yang masih rendah dan beban kerja yang tinggi. Aksi unjuk rasa buruh juga mempersoalkan syarat-syarat kerja yang kurang memadai (Komalasari dalam

Dialina, 1998), seperti lingkungan kerja dan penilaian kerja. Lalu, tuntutan hak-hak dasar buruh (*fundamental rights*), seperti hak mendirikan serikat buruh dan tuntutan agar pengusaha melaksanakan berbagai ketentuan hukum perburuhan (Uwiyono, 2001) juga mewarnai terjadinya aksi unjuk rasa buruh. Sebagai contoh, pada tahun 1990 para buruh PT. PR di Tangerang melakukan pemogokan karena menuntut pembentukan serikat buruh di perusahaan tempat mereka bekerja.

Apa pun bentuk dan beragamnya tuntutan para buruh, unjuk rasa diyakini oleh buruh sebagai pilihan strategis yang bersifat kolektif dan efektif sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar-menawar buruh terhadap perusahaan dan pemerintah. Meski berhenti bekerja dan berunjuk rasa (*strike*) bukan satu-satunya sarana, akan tetapi ia merupakan senjata yang ampuh bagi buruh, dan ditakuti jika ia bersifat massal, kolektif dan terorganisasi (Sudjana, 2002). Tidak mengherankan bila kemudian banyak serikat buruh yang berdiri. Depnaker RI (2001) menyebutkan hingga saat ini terdapat 40 serikat buruh nasional. Sejumlah serikat buruh tersebut cenderung menggunakan unjuk rasa sebagai metode perjuangan mereka, karena pengorganisasiannya yang sederhana, namun efektif. Akan tetapi, meski sederhana, tetap saja diperlukan kemampuan mobilisasi massa buruh secara efektif. Oleh karena bila dilakukan secara serampangan, unjuk rasa bisa menjadi senjata makan tuan bagi buruh, seperti dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dampak negatif aksi unjuk rasa tidak hanya dialami buruh, tetapi juga oleh perusahaan dan negara. Seperti, menurunnya produktivitas karena hilangnya jam kerja, apalagi jika disertai dengan tindakan destruktif, maka secara makro dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Para investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia mengancam akan memindahkan modalnya ke negara lain, seperti yang terjadi di PT. SIN yang mengancam akan keluar dari Indonesia, jika buruh-buruh PT. SIN tetap melakukan pemogokan (Uwiyono, 2001).

Meski berdampak negatif, aksi unjuk rasa buruh ini sulit dihindari, karena bagi buruh unjuk rasa buruh atau mogok merupakan hak fundamental yang *inherent* dengan hak kaum buruh untuk berunding (Uwiyono, 2001). Keadaan seperti ini juga terjadi di belahan negara lain, yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Jepang, dan Cina. Namun berbeda dengan negara-negara tersebut, seringkali aksi unjuk rasa buruh di Indonesia diikuti oleh tindakan destruktif, seperti aksi unjuk rasa buruh PT. M di Surabaya pada tahun 1999 yang berakhir dengan peristiwa kerusakan dan PT. KPC di Sangatta pada tahun 2000 yang berakhir dengan tindakan pengrusakan mesin dan peralatan penting lainnya. Penelitian untuk memahami bagaimana proses terjadinya tingkah laku aksi unjuk rasa buruh di Indonesia sangat diperlukan. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh masukan guna mengantisipasi aksi unjuk rasa buruh yang sering bersifat destruktif.

Perumusan Masalah

Dialina (1998) meneliti dinamika timbulnya aksi unjuk rasa pekerja ditinjau dari teori Smelser. Penelitian ini membuktikan bahwa teori Smelser dapat menjelaskan secara sistematis determinan-determinan utama dalam pembentukan tingkah laku kelompok, terutama pada aksi unjuk rasa pekerja. Adanya pembagian determinan-determinan yang berurutan namun berbeda satu sama lain sangat membantu

menjelaskan secara kronologis tingkah laku aksi unjuk rasa pekerja terjadi. Akan tetapi, tidak dengan jelas menggambarkan bagaimana hubungan antar satu determinannya saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa pekerja. Dalam penelitian tersebut, teori Smelser tidak cukup kuat untuk menjelaskan bagaimana determinan-determinan itu berperan serta mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa pekerja dan bagaimana isi determinan-determinan itu dapat mempengaruhi, serta bagaimana proses itu dapat terjadi (Dialina, 1998).

Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1986) diharapkan bisa lebih menjelaskan bagaimana proses terjadinya aksi unjuk rasa buruh secara sosial-psikologis. Bahkan, lebih jauh bagaimana proses terjadinya hingga bersifat destruktif. Teori ini mengemukakan bahwa keadaan yang tidak memuaskan bagi individu akan menggerakkan individu itu untuk mencari cara untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ia dapat melakukan berbagai cara tergantung pada struktur keyakinan subyektif (*subjective belief structures*) yang dimilikinya, yaitu keyakinan individu berkenaan dengan struktur sosial masyarakat dan hubungan antar kelompok yang ada di dalamnya.

Jika individu yakin bahwa batas-batas antar kelompok bersifat *permeable* (dapat ditembus), maka ia dapat dengan mudah melewati satu kelompok ke kelompok lainnya. Posisi individu tersebut dapat diperbaiki atau ditingkatkan (*improved*) dengan berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Akan tetapi, apabila individu berkeyakinan bahwa batas-batas antar kelompok itu keras, kaku, tertutup dan sulit ditembus (*impermeable*) sehingga ia tidak bisa berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Individu akan tertahan dalam status kelompoknya yang rendah dan hanya bisa berusaha menggunakan strategi yang bertujuan meningkatkan atau memperbaiki status sosial kelompoknya dengan strategi kolektif. Strategi ini bisa diwujudkan dalam aksi kolektif (*collective action*) yang militan, seperti pemberontakan, terorisme, unjuk rasa, atau bentuk yang moderat, seperti penandatanganan sebuah petisi, menghadiri pertemuan kelompok, dan lain-lain. Selain itu, identitas sosial seseorang juga memberi sumbangan yang berarti dalam memberikan pemahaman tentang dinamika kelompok, seperti gerakan sosial (Hogg & Abrams, 1990).

Berdasarkan teori Identitas Sosial, aksi unjuk rasa buruh dapat terjadi jika kaum buruh berkeyakinan bahwa batas-batas antar kelompok, yaitu antara kelompok buruh dan kelompok manajemen bersifat keras, kaku, tertutup dan sulit ditembus, serta jika buruh memiliki identifikasi kolektif yang kuat pada kelompoknya. Dari uraian tersebut kemudian dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian antara lain: Pertama, bagaimanakah karakteristik buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa? Kedua, apakah identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa?, dan yang ketiga, apakah keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan karakteristik buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
2. Menganalisis pengaruh identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa.
3. Menganalisis faktor yang menyumbang lebih besar pada partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Aksi Unjuk Rasa Buruh Sebagai Bentuk Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Social Movement yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gerakan sosial, merupakan sebuah konsekuensi dari perubahan drastis yang terjadi di masyarakat. Bonner (1953) menyebutnya sebagai refleksi dan kondisi dari perubahan sosial yang berasal dari ketidakpuasan terhadap *status quo*. Ketika masyarakat tidak puas terhadap lembaga yang ada karena lembaga itu tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, maka masyarakat berkeinginan untuk mengubah kondisi kehidupannya. Gerakan sosial mencerminkan suatu usaha mencari-cari dalam kegelapan untuk membuat sebuah tatanan sosial baru (*new social order*) dan mengubah lembaga yang dianggap sebagai sumber ketidakpuasan mereka (Bonner, 1953).

Gerakan sosial, sebagai usaha kolektif untuk meraih cara hidup baru, tersebar luas di dalam masyarakat yang mengalami perubahan sangat cepat dan inovatif. Perubahan tersebut cenderung membuat manusia hidup dalam kebingungan sebab manusia tidak selalu atau selamanya bisa menyesuaikan diri dengan cepat pula. Apalagi jika ditambah dengan keresahan, kegelisahan, dan ketidaknyamanan akibat PHK atau pengangguran, ketegangan politik di dalam negeri dan berbagai hal lainnya, maka menghadapi kondisi seperti itu, seseorang akan dengan cepat membuka ‘telinganya’ terhadap janji-janji tentang kehidupan yang lebih baik, betapa pun janji itu berupa *quixotic* (halusinasi) atau *utopian* (khayalan) belaka (Bonner, 1953).

Secara psikologis, gerakan sosial didefinisikan sebagai upaya dari sejumlah besar orang untuk memecahkan persoalan secara kolektif terhadap persoalan yang mereka rasakan sama (Toch dalam Milgram & Toch, 1975). Upaya ini cenderung dilakukan selama tidak adanya pemecahan atau perbaikan terhadap persoalan yang dihadapi oleh individu-individu yang terlibat, maka gerakan sosial menawarkan pemecahan atau perbaikan. Oleh sebab itu, individu yang berada dalam masyarakat yang tidak mengalami kemajuan atau perbaikan yang menjadi sumber ketidakpuasan, berkemungkinan untuk bergabung dengan gerakan sosial yang menjanjikan harapan, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, gerakan sosial merupakan sebuah kelompok besar yang secara spontan mendukung sejumlah tujuan dan keyakinan yang dianut oleh para anggotanya. Atau dengan kata lain, sebagai bentuk tingkah laku kolektif dengan standar (norma) yang ‘pas’ dengan perubahan (Toch dalam Milgram & Toch, 1975).

Gerakan sosial beraneka ragam jenisnya, menyangkut berbagai macam kelompok dengan berbagai dimensinya. Ada gerakan yang terbentuk dari kelompok terpelajar

dengan tujuan dan agenda yang jelas, ada yang merupakan manifestasi dari semangat yang besar dengan berbagai tuntutan yang bersifat emosional. Ada pula gerakan yang terorganisir secara cermat dengan menetapkan hak dan kewajiban, serta peran yang jelas, namun ada pula gerakan yang merupakan bentuk dari demokrasi atau anarki. Blumer (dalam Bonner, 1953) membedakan gerakan sosial menjadi tiga jenis, yaitu: 1) *General Social Movements*, yaitu bentuk gerakan sosial yang bercirikan ketiadaan koordinasi dan pengarahan khusus, serta kepemimpinan yang jelas. Gerakan sosial jenis ini berlangsung alamiah, sering tampak dalam berbagai literatur dan pembicaraan yang tidak teratur. Bonner (1953) mengkategorikan gerakan emansipasi atau feminisme sebagai gerakan sosial jenis ini. 2) *Specific Social Movements*, yaitu bentuk tingkah laku massa. Individu-individu yang ada di dalamnya mempunyai tujuan, organisasi dan kepemimpinan yang jelas. Sebagai gerakan yang terorganisir, para anggota memiliki tanggungjawab, tugas terperinci, *morale* kelompok yang terdefinisi secara jelas dan rencana aksi yang jelas (Blumer dalam Bonner, 1953), yang keanggotaannya bercirikan 'kesadaran akan kami' (*we-consciousness*) (Blumer dalam Brown, 1954), serta mempunyai nilai-nilai dan harapan (*values and expectations*) dan pembagian kerja (Brown, 1954). Contoh untuk gerakan sosial jenis ini adalah gerakan reformasi dan gerakan revolusi (Blumer dalam Bonner, 1953; Brown, 1954; Lyman, 1995). 3) *Expressive Social Movements*, merupakan bentuk gerakan sosial yang para anggotanya tidak berkeinginan untuk membangun sebuah tatanan sosial baru melainkan semata-mata mengekspresikan kebutuhannya sendiri sebagai motivasi utamanya. Meski tidak berupaya membangun tatanan sosial baru, pergerakan sosial jenis ini memiliki pengaruh yang besar terhadap tatanan sosial yang ada. Yang termasuk dalam gerakan sosial jenis ini adalah gerakan keagamaan (Blumer dalam Brown, 1954; Lyman, 1995), gerakan mode (*fashion movements*) (Blumer dalam Lyman, 1995).

Aksi unjuk rasa buruh yang menjadi perhatian utama penelitian ini merupakan sebuah upaya kolektif dari sejumlah buruh untuk memecahkan persoalan secara kolektif terhadap persoalan yang dirasakan sama dan secara kolektif pula mendukung sejumlah tujuan dan keyakinan yang sama. Bisa dikatakan bahwa aksi unjuk rasa buruh dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk gerakan sosial. Dengan adanya tujuan, organisasi, kepemimpinan yang jelas, dan berkembangnya keanggotaan yang bercirikan 'kesadaran akan kami', serta adanya nilai-nilai dan harapan, maka aksi unjuk rasa buruh dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial yang spesifik.

Pengertian Istilah Buruh

Penggunaan istilah buruh dalam penelitian ini dibanding istilah pekerja atau karyawan tidak bertendensi politis, melainkan lebih disebabkan nuansanya yang dianggap serasi. Seperti, istilah 'gerakan buruh' dibandingkan dengan 'gerakan pekerja/karyawan', atau istilah 'aksi unjuk rasa buruh' dibandingkan dengan 'aksi unjuk rasa pekerja/karyawan', atau juga istilah 'Serikat Buruh' dibandingkan dengan 'Serikat Pekerja/Karyawan', dan sebagainya.

Selain itu, penggunaan istilah buruh di dalam penelitian ini dianggap akan dapat menggambarkan hubungan yang vertikal antara buruh dan majikan (kelompok buruh

dan kelompok manajemen perusahaan), dan bahwa di dalam hubungannya itu terdapat pertentangan kepentingan yang berbeda. Dengan menggunakan istilah buruh, kiranya buruh dapat dikonotasikan sebagai kelompok tenaga kerja kelas bawah yang mengandalkan tenaga fisik dalam bekerja.

Adapun yang dimaksud dengan istilah buruh menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah. Mengacu pada kedua pengertian istilah buruh tersebut, siapa pun yang bekerja pada perusahaan dengan mendapatkan upah kemudian ikutserta dalam aksi unjuk rasa buruh, maka ia menjadi subyek penelitian ini.

Teori Identitas Sosial

Teori Identitas Sosial pertama kali digagas oleh Tajfel (1972), yang kemudian dikembangkan oleh Turner (1982). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial dan penelitian yang berkaitan dengan hubungan antar kelompok dan perubahan sosial. Berdasarkan teori Identitas Sosial, identitas sosial seseorang sangat penting dalam memahami perilaku kelompok. Identitas sosial disini diartikan sebagai pengetahuan seseorang tentang dirinya, bahwa ia merupakan bagian dari kelompok sosial tertentu dan sebagai anggota kelompok, ia menganut nilai dan emosi yang bermakna dengan kelompok itu (Tajfel dalam Hogg & Abrams, 1990). Oleh sebab itu, peranan identifikasi kolektif sehubungan dengan identitas sosial perlu mendapat perhatian dalam proses tingkah laku kelompok, seperti gerakan sosial, khususnya aksi unjuk rasa buruh.

Tajfel (1981) merumuskan kembali definisi gerakan sosial dari Toch (1965) dengan menambahkan komponen identifikasi kolektif. Menurut Tajfel (1981), gerakan sosial harus dipahami berdasarkan tataran psikologi sosial, yaitu “upaya yang dilakukan oleh sejumlah orang, *yang mendefinisikan dirinya dan didefinisikan pula oleh anggota lain sebagai kelompok*, untuk secara kolektif memecahkan persoalan yang dirasakan bersama, dan persoalan itu muncul akibat hubungan dengan kelompok lain”. Kata-kata yang dicetak miring adalah tambahan dari Tajfel. Turner et.al (dalam Simon et.al, 1998) menegaskan bahwa partisipasi dalam gerakan sosial adalah tingkah laku bersama anggota kelompok sehingga identifikasi kolektif merupakan proses sosial-psikologis yang mendasari tingkah laku tersebut.

Kelly & Brelinger (1995) menyelidiki peranan identifikasi kolektif dalam menumbuhkan motivasi berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Mereka menemukan bahwa kemauan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif meningkat seiring dengan meningkatnya identifikasi kolektif sebagai perempuan. Lebih lanjut, Kelly & Brelinger mengukur identifikasi kolektif sebagai aktivis feminisme dan menemukan bahwa variabel ini sebagai prediktor yang lebih kuat terhadap kemauan untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Berdasarkan penelitian tersebut, identifikasi kolektif terbukti merupakan prediktor yang unik terhadap kemauan seseorang untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Oleh sebab itu, penelitian ini juga mengharapkan adanya peranan identifikasi kolektif yang positif pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.

Sebagaimana uraian terdahulu, teori Identitas Sosial juga mengemukakan bahwa bila individu atau anggota subordinat berkeyakinan bahwa batas-batas antar kelompok bersifat *impermeable* sehingga individu tidak bisa berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain, maka individu akan tertahan dalam posisi status kelompoknya yang rendah dan hanya bisa berusaha menggunakan strategi yang bertujuan memperbaiki atau meningkatkan status sosial kelompoknya. Dalam hal ini, ia akan menggunakan strategi kolektif (Simon et.al, 1998) atau *group-oriented strategies* (Lalonde & Silverman, 1994). Strategi kolektif digunakan bilamana individu percaya atau yakin bahwa “satu-satunya cara untuk mengubah keadaan yang tidak menguntungkan (*disadvantaged*) ini adalah bergabung bersama-sama sebagai satu kelompok yang menyeluruh” (Tajfel, 1981). Berkenaan dengan strategi ini, maka partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa dipandang sebagai bentuk strategi kolektif karena merupakan sebuah usaha bersama dari para buruh untuk memecahkan persoalan mereka secara kolektif, khususnya berkenaan dengan persoalan yang dirasakan sama.

Pengaruh permeabilitas batas-batas kelompok terhadap kemauan untuk mengusahakan tindakan individual atau kolektif telah diteliti oleh Wright, Taylor & Moghaddam (1990). Studi ini menemukan pengaruh yang signifikan berkenaan dengan derajat keterbukaan antar kelompok atau permeabilitas kelompok terhadap kemauan menggunakan tindakan kolektif yang non- normatif, seperti menulis protes. Diketahui pula bahwa hanya ketika *advantaged group* sangat tertutup, maka kemauan menggunakan tindakan kolektif meningkat. Ellemers & van Knippenberg (1990) juga meneliti di laboratorium pengaruh permeabilitas batas-batas kelompok terhadap tindakan kolektif sehubungan dengan *advantaged group* dan *disadvantaged group*. Dalam kondisi *permeable*, mobilitas sosial dari posisi status yang rendah ke status yang tinggi memungkinkan, tetapi mobilitas tidak memungkinkan dalam kondisi *impermeable*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketika batas-batas kelompok *permeable*, individu cenderung bertindak *selfish* dalam upayanya berpindah ke status kelompok yang lebih tinggi. Apabila ambisi pribadi tidak bisa menjadi kenyataan karena kondisi yang *impermeable*, maka individu akan bertindak bersama-sama dengan kelompoknya untuk meningkatkan statusnya. Meski terbukti, penelitian di laboratorium dianggap kurang menggambarkan bagaimana peranan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok terhadap pilihan tindakan individu di dunia nyata. Diharapkan dengan melakukan penelitian di lapangan peranan keyakinan subyektif buruh tentang permeabilitas kelompok terhadap pilihan tindakan kolektif, yaitu aksi unjuk rasa buruh dapat tergambarkan secara jelas.

Hipotesis

1. Identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa.
2. Keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.

METODE PENELITIAN

Sampel

Subyek penelitian diambil secara *purposive sampling*. Subyek berjumlah 102 buruh yang terlibat dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung MD Jakarta pada bulan Agustus 2002. Meski berunjuk rasa di Jakarta, subyek penelitian merupakan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan bidang Tekstil, Sandang dan Kulit yang berdomisili di Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Subyek terdiri dari 45 pria dan 57 wanita dengan *mean* usia berkisar 25-34 tahun.

Ada tiga alat yang digunakan dalam penelitian ini yang masing-masing mengukur:

a. Identifikasi Kolektif (IK)

Alat ini mengukur kuat atau lemahnya identifikasi individu pada kelompoknya pada saat mengalami masalah bersama sebagai akibat hubungan dengan kelompok lain. Identifikasi kuat berarti antara individu dan kelompoknya terjadi ikatan yang kuat dan sebagai dasar dipilihnya strategi kolektif oleh individu dalam menyelesaikan masalah bersama. Sebaliknya, identifikasi kolektif lemah diartikan sebagai lemahnya ikatan individu dengan kelompoknya, dan oleh karena itu menempuh strategi individual dalam menyelesaikan masalah bersama.

Contoh *item*:

Saya bangga sebagai bagian dari kelompok buruh.

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

b. Keyakinan Subyektif tentang Permeabilitas Kelompok (KSPK)

Alat ukur ini disusun untuk mengetahui bagaimana keyakinan individu tentang *permeable* atau tidaknya (*impermeable*) batas-batas antara kelompok buruh dengan kelompok manajemen. Jika keyakinan subyektif individu tentang permeabilitas tinggi, maka batas-batas antar kelompok yang saling berhubungan mudah ditembus, terbuka dan luwes. Namun, jika keyakinan subyektif tentang permeabilitas rendah, maka batas-batas antar kelompok sulit ditembus, tertutup, kaku dan keras.

Contoh *item*:

Menurut saya, perusahaan memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan perusahaan.

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

c. Partisipasi dalam Aksi Unjuk Rasa

Alat ini dibuat guna mengetahui motif dan frekuensi keikutsertaan subyek dalam aksi unjuk rasa, seperti apakah sekedar iseng, untuk mencapai kepentingan bersama, berapa kali terlibat dalam aksi unjuk rasa buruh, dan lain-lain.

Contoh *item*:

Saya ikutserta dalam aksi unjuk rasa buruh ini agar keinginan dan cita-cita bersama tercapai.

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

Ketiga alat penelitian ini diuji melalui analisis item dengan rumus koefisiensi *Alpha Cronbach*, yang perhitungannya dibantu program komputer *SPSS 10.00 for Windows*. Nilai koefisien untuk masing-masing alat adalah 0,79, 0,91 dan 0,88.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Regresi Linear Berganda dengan persamaan: $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$; uji *t* dan uji *F*. Analisis data dibantu program komputer *SPSS 10.0 for Windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Subyek Penelitian

Subyek berjumlah 102 orang yang terlibat dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung MD Jakarta. Berdasarkan jenis kelamin, subyek pria dan wanita yang terlibat dalam aksi unjuk rasa relatif seimbang, yaitu 45 pria (44,1%) dan 57 wanita (55,9%). Sebagian besar subyek, yaitu 61 responden (59,8%) belum menikah. Rata-rata usia subyek berkisar antara 25 – 34 tahun, yaitu 47 responden (46,1%). Subyek dalam usia produktif lebih memungkinkan untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa buruh. Selain itu, cenderung diikuti oleh subyek dengan status belum menikah daripada berstatus menikah karena keterlibatan dalam aksi unjuk rasa buruh mengandung resiko besar, seperti pemecatan (PHK).

Sebagian besar tingkat pendidikan subyek, yaitu 75,5 persen adalah tamatan SLTA dan 63 persen subyek berpenghasilan di atas Rp. 500.000,00. Sebenarnya sebagian besar subyek sudah menerima pendapatan yang sesuai, bahkan melebihi Upah Minimum Regional untuk Propinsi Jawa Barat, yaitu sebesar Rp 245.000,00 (Biro Pusat Statistik, 2001). Akan tetapi, 49 responden (48,4%) menyatakan bahwa pendapatan tersebut masih kurang dan 53 responden (51,6%) menyatakan 'pas-pasan' untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat dimaklumi karena biaya yang harus dikeluarkan sebagian besar subyek (67,6%) setiap harinya adalah di atas Rp 10.000,00. Gambaran karakteristik subyek penelitian disajikan pada Tabel 1.

Gambaran Identifikasi Kolektif, Keyakinan Subyektif tentang Permeabilitas Kelompok Partisipasi dalam Aksi Unjuk Rasa dan pada Subyek Penelitian

Meski 53 responden (52%) menyatakan bahwa di perusahaan tempat subyek bekerja tidak ada Serikat Buruh/Pekerja, akan tetapi sebagian besar subyek, yaitu 76 responden (74,5%) merupakan anggota sebuah Serikat Buruh/Pekerja. Ada 81 responden (79,4%) yang menyatakan bahwa subyek merupakan anggota Serikat Buruh/Pekerja lain di luar perusahaan tempat subyek bekerja. Bagi subyek, Serikat Buruh/Pekerja mempunyai makna yang dalam, terdapat 53 responden (52%) yang menyatakan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Serikat Buruh/Pekerja. Menjadi anggota Serikat Buruh/Pekerja, bagi subyek meningkatkan harga diri

(94,1%) dan keyakinan diri (95,1%). Bahkan, subyek menyatakan bangga (92,1%) dan tidak malu (85,3%) sebagai bagian dari kelompok buruh. Dengan menjadi bagian dari kelompok buruh, subyek memiliki rasa saling memiliki (89,2%), rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat (95,1%) dan rela berkorban demi kepentingan buruh (97%).

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian

Karakteristik Subyek Penelitian		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	45	44,1
	Wanita	57	55,9
Status Perkawinan	Belum Menikah	61	59,8
	Menikah	39	38,7
	Duda/Janda	2	2,0
Usia	15 – 24 tahun	30	29,4
	25 – 34 tahun	47	46,1
	35 – 44 tahun	14	13,7
	45 – 54 tahun	10	9,8
	55 – 64 tahun	1	1,0
Tingkat Pendidikan	Tamat SD	5	4,9
	Tamat SMP	19	18,6
	Tamat SLTA	77	75,5
	Tamat Akademik/PT	1	1,0
Tingkat Pendapatan	< Rp 300.000,00	4	3,9
	Rp 300.000,00 – 500.000,00	35	34,3
	> Rp 500.000,00	63	61,8

Rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat, serta kerelaan untuk berkorban demi kepentingan buruh berperan besar terhadap keikutsertaan subyek dalam aksi unjuk rasa buruh. Sebanyak 84 responden (82,4%) menyatakan bahwa keikutsertaan dalam aksi unjuk rasa buruh adalah agar keinginan bersama tercapai. Oleh sebab itu, 83 responden (81,4%) menyatakan tidak peduli dengan resiko yang timbul karena keikutsertaan dalam aksi unjuk rasa buruh. Bahkan, 71 responden (69,6%) menyatakan akan ikutserta dalam aksi unjuk rasa buruh yang lain bila di kemudian hari ada unjuk rasa buruh. Subyek menganggap bahwa kegiatan aksi unjuk rasa bukan lah sesuatu kegiatan yang main-main, melainkan sesuatu hal yang penting untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Terdapat 99 responden (97,1%) menolak bila dikatakan bahwa keikutsertaan dalam aksi unjuk rasa buruh karena iseng belaka.

Anggapan subyek terhadap manajemen perusahaan juga mempunyai andil terhadap keikutsertaan dalam aksi unjuk rasa buruh. Terdapat 87 responden (85,3%) yang menyatakan sikap perusahaan tidak terbuka atau tertutup, perusahaan menerapkan peraturan secara kaku (83,3%), perusahaan kurang luwes (94,1%) dan kurang tanggapnya manajemen perusahaan atas keluhan buruh (79,4%). Sikap manajemen yang kurang terbuka tentang kemajuan dan kemunduran perusahaan menimbulkan anggapan yang negatif pada subyek. Seringkali kemajuan yang dialami atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak diberitahukan kepada subyek. Adapun kemunduran atau kerugian yang dialami oleh perusahaan senantiasa diberitahu

kepada subyek. Kurang tanggapnya perusahaan atas keluhan buruh juga memberi kesan yang buruk pada subyek. Perusahaan dianggap hanya mengutamakan kepentingannya dan memanfaatkan subyek untuk kepentingan perusahaan tanpa menghargai sedikit pun jerih payah subyek. Selain itu, hampir tidak ada mobilitas sosial secara vertikal pada subyek, setinggi-tingginya status subyek yang diraih selama bertahun-tahun bekerja adalah sebagai *mandor* (kepala buruh). Umumnya, subyek melakukan mobilitas sosial secara horizontal, yaitu pindah ke perusahaan lain yang memberi upah lebih tinggi, namun dengan status yang sama. Hanya sebagian kecil subyek yang meluangkan waktunya untuk mengambil kursus *kecil-kecilan* (harga relatif murah). Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan subyek dengan harapan dapat memperoleh posisi pekerjaan yang lebih baik.

Hasil Uji Hipotesis

Sebagaimana diharapkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel identifikasi kolektif dengan variabel partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa. Hal ini terlihat dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,622 dan $p = 0,000$, yang bila dibandingkan dengan $r_{tabel} \approx 0,159$, ternyata lebih besar. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin kuat identifikasi kolektif pada buruh akan membuat partisipasinya dalam aksi unjuk rasa buruh semakin meningkat. Tingkat signifikansi koefisien korelasi yang menghasilkan angka 0,000 dan probabilitasnya jauh dari 0,05, memperlihatkan bahwa korelasi antara identifikasi kolektif dan partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa sangat nyata. Adapun koefisien determinasi (r^2) untuk variabel identifikasi kolektif adalah 0,456. Artinya, partisipasi dalam aksi unjuk rasa buruh ditentukan oleh identifikasi kolektif sebesar 45,6% dan sisanya 54,4% ditentukan oleh faktor lain.

Analisis korelasi antara variabel keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok dengan variabel partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa juga seperti yang diharapkan. Yaitu, bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara variabel keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok dengan variabel partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) yang diperoleh sebesar -0,675 dan $p = 0,000$. Dengan tingkat kesalahan 5%, nilai hitung ini lebih besar bila dibandingkan dengan $r_{tabel} \approx 0,159$, dan probabilitasnya jauh dari 0,05, menunjukkan bahwa korelasi antara keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok dengan partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa sangat nyata. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa semakin rendah keyakinan subyektif buruh tentang permeabilitas kelompok akan membuat partisipasinya dalam aksi unjuk rasa buruh semakin meningkat. Adapun koefisien determinasi (r^2) untuk variabel keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok adalah 0,662. Artinya, partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa ditentukan oleh 66,2% keyakinan subyektif buruh tentang permeabilitas kelompok.

Tabel 2. Analisis Korelasi Variabel Identifikasi Kolektif dan Keyakinan Subyektif tentang Permeabilitas Kelompok dengan Partisipasi dalam Aksi Unjuk Rasa

Pearson Correlation	IK	KSPK	PAUR
IK	1.00	-.275	.622
KSPK	-.275	1.00	-.675
PAUR	.622	-.675	1.00
Sig. (1-tailed)	.	.003	.000
	.003	.	.000
	.000	.000	.

Analisis regresi dalam penelitian ini menghasilkan persamaan regresi: $Y = 34,97 + 0,187X_1 - 0,113X_2$. Dari uji t, untuk variabel identifikasi kolektif diperoleh thitung, yaitu 7,761 yang lebih besar daripada ttabel, yaitu 1,960 dengan probabilitas 0,000 yang jauh dari 0,05 sehingga identifikasi kolektif benar-benar berpengaruh terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa. Adapun untuk variabel keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok nilai thitung sebesar -8,974 juga lebih besar dari ttabel dan probabilitasnya juga jauh dari 0,05, membuktikan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok benar-benar berpengaruh terhadap partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa. Dengan demikian hipotesis pertama **diterima** (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	50.534	.792		63.817	.000
KSPK	-.139	.015	-.675	-9.152	.000
2 (Constant)	34.974	2.101		16.648	.000
KSPK	-.113	.013	-.546	-8.974	.000
IK	.187	.024	.472	7.761	.000

Selanjutnya, dengan menggunakan metode *stepwise* diketahui bahwa keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi: $Y = 50,534 - 0,139X_2$, sehingga hipotesis kedua pun **diterima** (lihat Tabel 3).

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan empat hal berkenaan dengan teori Identitas Sosial, antara lain: Pertama, penelitian ini mendukung teori Identitas Sosial tentang identifikasi kolektif. Dalam berhubungan dengan kelompok lain, individu cenderung memperbesar identifikasi kolektif, terutama jika individu berada dalam kelompok yang statusnya lebih rendah daripada kelompok lain. Dengan memperbesar identifikasi kolektif, buruh memiliki perasaan sejahtera, meningkatkan harga diri

dan keyakinan diri yang besar. Menurut Ellemers dan Doosje (1997), individu yang memiliki indentifikasi kolektif yang tinggi cenderung bertahan di dalam kelompoknya dan enggan melakukan mobilitas sosial ke atas secara individual. Dengan demikian, peranan identifikasi kolektif sangat penting sehingga tidak bisa diabaikan keterkaitannya dengan keterlibatan seseorang dalam gerakan sosial, khususnya aksi unjuk rasa. Kedua, penelitian ini mendukung teori Identitas Sosial berkenaan dengan pilihan strategi. Individu yang berkeyakinan subyektif bahwa batas-batas antar kelompok sulit ditembus, tertutup, keras dan kaku (*impermeable*), lebih menyukai strategi yang bersifat kolektif. Data penelitian memperlihatkan buruh berkeyakinan bahwa kelompok manajemen perusahaan bersikap tertutup, tidak tanggap atas keluhan buruh dan menerapkan peraturan secara kaku. Penemuan ini mendukung hasil temuan Proyek Penelitian Operasional Ketenagakerjaan (1993), yaitu masih terdapat perusahaan yang kurang tanggap atas keresahan, keluhan kesah maupun tuntutan yang disampaikan pekerja memberi peluang timbulnya pemogokan dan unjuk rasa. Bahkan, kurang tanggapnya perusahaan atas tuntutan pekerja melalui pemogokan dan unjuk rasa tidak saja memberi peluang timbulnya pengrusakan, tetapi juga memberi peluang pihak luar memanfaatkan momentum. Ketiga, nilai prediksi teori Identitas Sosial cukup signifikan untuk mengantisipasi timbulnya tingkah laku kelompok, khususnya aksi unjuk rasa buruh di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan Lalonde & Silverman (1990) bahwa pilihan mengambil tindakan kolektif lebih disukai jika identitas sosial lebih menonjol (*salient*) dan batas-batas antar kelompok dalam keadaan tertutup daripada terbuka. Keempat, teori Identitas Sosial dalam penelitian ini memang tidak menggambarkan secara jelas bagaimana proses terjadinya aksi unjuk rasa buruh hingga berakhir dengan tindakan destruktif. Besar kemungkinan karena fakta di lapangan para buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa sering tidak secara langsung berhadapan dengan pihak manajemen perusahaan, melainkan dengan pihak keamanan. Seringkali terjadinya tindakan destruktif merupakan akibat ketegangan antara kelompok buruh yang berunjuk rasa dengan kelompok keamanan atau kepolisian. Namun demikian, digunakannya pihak keamanan atau kepolisian dalam menghadapi pihak buruh mempertegas sifat *impermeable* perusahaan. Pihak keamanan atau kepolisian dianggap buruh sebagai simbol kekuasaan sehingga buruh semakin yakin secara subyektif bahwa perusahaan sangat tertutup dan tidak dapat diajak berdialog atau berunding.

Aksi unjuk rasa buruh di Indonesia yang sering bersifat destruktif sangat berbeda dengan keadaan di negara-negara lain. Dalam Penelitian Dampak Pemogokan terhadap Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja (1993) ditemukan bahwa perusahaan yang buruhnya sering berunjuk rasa adalah perusahaan yang manajemennya dikelola oleh warganegara asing, seperti Taiwan, Korea, Amerika, Jepang, Australia, dan lain-lain, yang tergolong *homo economicus*. Yaitu, manajemen yang lebih mementingkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, disiplin dan mendorong produktivitas kerja yang tinggi daripada syarat-syarat kerja yang tinggi.

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak bisa dikontrolnya faktor psikologis, seperti kecemasan, kelelahan, dan lain-lain karena keikutsertaan subyek dalam aksi unjuk rasa. Hal ini tampak dari pengembalian kuesioner yang seharusnya berjumlah 150, tetapi data yang layak digunakan sebagai analisis diperoleh dari 102 subyek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa tidak membedakan jenis kelamin. Buruh pria dan wanita ikutserta dalam aksi unjuk rasa buruh. Rata-rata buruh berusia produktif dan status belum menikah, serta memperoleh pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Identifikasi kolektif dan keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok mempengaruhi secara signifikan pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa. Selain itu, keyakinan subyektif tentang permeabilitas kelompok memberi sumbangan yang lebih besar daripada identifikasi kolektif. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dirumuskan dari teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1986) sehingga membuktikan teori ini cukup mampu dan signifikan dalam memprediksikan tingkah laku kelompok.

Berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Perusahaan diharapkan mengembangkan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan identifikasi kolektif buruh pada perusahaan. Misalnya, menggunakan seragam perusahaan yang sama oleh pihak manajemen dan buruh pada hari-hari tertentu, mengadakan kegiatan bersama antara pihak manajemen dan buruh, dan lain-lain.
2. Manajemen perusahaan membuka dialog dengan pihak buruh dan tidak terlalu lama mengabaikan keluhan-keluhan buruh. Keluhan buruh yang tidak segera ditanggapi memberi peluang timbulnya aksi unjuk rasa buruh, apalagi jika buruh memiliki identifikasi kolektif yang kuat dengan sebuah Serikat Buruh.
3. Melakukan penelitian komparatif antara lain: a) pada buruh yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa dan tidak berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa sehingga nilai prediksi teori Identitas Sosial akan lebih terbukti secara empiris, b) pada aksi unjuk rasa buruh di Indonesia dan di negara lain, c) tentang perburuhan pada perusahaan yang dikelola warganegara asing dan Indonesia, dan penelitian hubungan antar kelompok pada kelompok buruh yang berunjuk rasa dengan kelompok keamanan atau kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonner, H. 1953. *Social Psychology; an interdisciplinary approach*. American Book Company: New York, USA.
- Brown, R.W. 1954. Mass Phenomena. Dalam G. Lindzey (Ed.). *Handbook of Social Psychology*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.: Massachussetes, USA.
- Dialina, R. 1998. *Dinamika Timbulnya Aksi Unjuk Rasa pada Pekerja ditinjau dari Teori Smelser*. *Jurnal Psikologi Sosial*, IV, pp. 9-28.
- Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. 1997. *Sticking Together or Falling Apart: In-Group Identification as a Psychological Determinant of Group Commitment Versus Individual Mobility*. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol.72, No. 3, pp. 617-626.

- Ellemers, N., van Knippenberg, A., & Wilke, H. 1990. *The Influence of Group Boundaries and Stability of Group Status on Strategies of Individual Mobility and Social Change*. *British Journal of Social Psychology*, 29, pp. 233-246.
- Hogg, M. A & Abrams, D. 1990. *Social Identification; a social psychology of intergroup and group process*. Routledge: New York, USA.
- Kelly, C. & Breinlinger, S. 1995. *Identity and Injustice Exploring Women's Participation in Collective Action*. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 5, pp. 41-57.
- Lalonde, R. N. & Silberman, R.A. 1994. *Behavioral Preferences in Response to Social Injustice: The Effect of Group Permeability and Social Identity Salience*. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 66 No. 1, pp. 78-85.
- Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pembinaan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja 1980-2000. 2001. *Profil Sumberdaya Manusia Indonesia*, Depnaker RI: Jakarta.
- Lyman, M.S. 1995. *Social Movements: critiques, concepts case studies*. New York University Press: New York.
- Milgram, S., & Toch, H. 1975. *Collective Behavior; Crowds and Social Movements*. Dalam G. Lindzey & E. Aronson (Eds). *Handbook of Social Psychology*, Vol. 4. Amerind Publishing Company Pvt.Ltd: New Delhi.
- Proyek Penelitian Operasional Ketenagakerjaan. 1993. *Penelitian Dampak Pemogokan Terhadap Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja*. Depnaker RI: Jakarta.
- Simon, B., Loewy, M., Sturmer, S., & Weber, U. et.al. 1998. *Collective Identification and Social Movement Participation*. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 74, No. 3, pp. 646-658.
- Sudjana, E. 2002. *Buruh Menggugat; Perspektif Islam*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Tajfel, H. & Turner, J. C. 1986. *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior dalam S. Worchel & W. G. Austin (Eds.). Psychology of Intergroup Relations*, pp. 7-29. Nelson Hall: Chicago.
- Taylor, D.M. & Moghaddam, F. M. 1994. *Theories of Intergroup Relations; International Social Psychological Perspectives*. Praeger: London.
- Uwiyono, A. 2001. *Hak mogok di Indonesia*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Wright, S., Taylor, D. M., & Moghaddam, F. M. 1990. *Responding to Membership in a Disadvantaged Group: From Acceptance to Collective Protest*. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 54, No. 6, pp. 994-1003.

